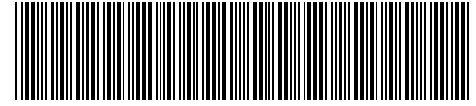




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400082/2023**



DS:4481-3176-0071-0107

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK
- Sebesar : Rp. 75.200.000 ( TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

		Jumlah Uang
	Rp.	75.200.000
	Rp.	75.200.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |            |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 75.200.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |            | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |            | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN FAK - FAK (067) Rp. 75.200.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4481-3176-0071-0107

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				75.200.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				75.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
		7. 03	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	100,00	Perkara, Berkas Perkara		44.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U13 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	100,00	Perkara		44.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	80,00	Orang		31.200.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	80,00	Orang		31.200.000

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

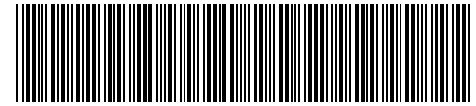
ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023

I B. SUMBER DANA



DS:4481-3176-0071-0107

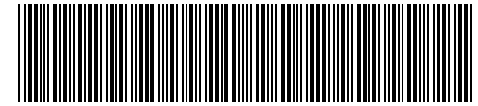
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
 Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	75.200.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	75.200.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4481-3176-0071-0107

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK  
Kewenangan : (KD)

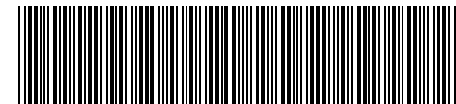
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	-	75.200	-	-	-	75.200		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	75.200	-	-	-	75.200		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	75.200	-	-	-	75.200		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)	-	44.000	-	-	-	44.000	33 . 03	
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	067	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)	-	31.200	-	-	-	31.200	33 . 03	
01	RM	-	31.200	-	-	-	31.200	067	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>75.200</b>	-	-	-	<b>75.200</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4481-3176-0071-0107

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

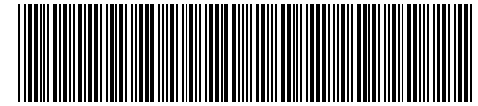
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400082	<b>PENGADILAN NEGERI FAK FAK</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.145	4.871	5.207	5.545	6.275	6.435	8.228	8.751	7.639	6.368	6.362	8.375	75.200
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.145	4.871	5.207	5.545	6.275	6.435	8.228	8.751	7.639	6.368	6.362	8.375	75.200
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.145	4.871	5.207	5.545	6.275	6.435	8.228	8.751	7.639	6.368	6.362	8.375	75.200
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.145	4.871	5.207	5.545	6.275	6.435	8.228	8.751	7.639	6.368	6.362	8.375	75.200
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	670	7.974
		- PNBP (425231)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.320
		- PNBP (425233)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	123	1.410
		- PNBP (425239)	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	5.244

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:4481-3176-0071-0107

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [33] PAPUA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [400082] PENGADILAN NEGERI FAK FAK

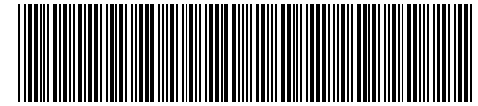
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:4481-3176-0071-0107

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [33] PAPUA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [400082] PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002